

Perdagangan Indonesia Menghadapai Era Informasi

Oleh Awan Setya Dewanta¹

Pendahuluan

Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah sendi-sendi kehidupan antar bangsa. Perkembangan teknologi komunikasi yang telah meningkatkan arus informasi, juga memberikan dampak kepada peningkatan mobilitas kapital. Penguasaan terhadap informasi tersebut menjadikan kemampuan kapital berlipat ganda. Kapital berputar ke seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Kekurangan kapital suatu negara dapat diatasi dengan investasi langsung dari negara yang kelebihan kapital dalam tempo relatif cepat.

Pelipatgandaan kemampuan kapital tersebut memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Pada akhir abad ke-20 ini telah memunculkan tiga megamarket ekonomi dunia, yaitu Uni Eropa, Amerika Utara, Asia Timur dan Tenggara. Ketiga kawasan ini mendominasi 70% ekspor dunia dan memproduksi 62% produk kepabrikaan dunia, serta menjadi sumber investasi internasional.

Bagaimana Indonesia menghadapi persaingan ini? Tulisan ini mencoba melihat "kemampuan" Indonesia menghadapi persaingan dagang di pasar internasional pada era informasi ini. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan era industri ke era informasi, semakin meningkatkan gelombang perdagangan bebas. Pada era informasi ini, peningkatan perdagangan internasional tidak hanya diramalkan oleh perdagangan barang dan jasa, juga diramalkan oleh perdagangan kapital dan

intelektual. Bagi Indonesia ataupun negara-negara berkembang lainnya, kemampuan bersaing dalam perdagangan barang dan jasa masih banyak mengalami kesulitan. Maka, dengan nada khawatir, mungkinkah negara-negara berkembang mampu bersaing dalam perdagangan kapital dan intelektual yang saat ini masih dikuasai oleh negara-negara maju?

Kondisi sosial-ekonomi era informasi

Apa ciri-ciri dari era informasi tersebut? Menurut Kenichi Ohmae, era informasi ini ditandai oleh semakin tipisnya batas geografis suatu negara karena empat hal. *Pertama*, investasi bergerak secara bebas dan mencari peluang yang paling menguntungkan. Penurunan insentif terhadap kapital akan mengakibatkan pelarian kapital ke sektor lain atau negara lain. Insentif tersebut tidak hanya berupa tingkat bunga yang ditawarkan tetapi juga faktor non-ekonomi. Perbedaan tingkat bunga yang ditawarkan tidak hanya disebabkan ekonomi biaya tinggi (ketidakefisienan) yang terjadi, tetapi juga disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam kebijakan, pengurusan ijin, ataupun penegakan hukum.

Kedua, adalah globalisasi industri. Perusahaan multinasional, yang telah memiliki kekuatan keuangan setara dengan negara, semakin terintegrasi dengan ekonomi domestik melalui penanaman modal dan transfer teknologi. Perusahaan akan memilih menanamkan modal atau memindahkan pabrik ke negara yang memberikan keuntungan yang tinggi seperti perusahaan elektronika Jepang memindahkan pabrik di

¹ Adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan sedang menempuh S₂ di University of Philipines

negara Malaysia dan dipasarkan ke Asia Tenggara.

Yang *ketiga* adalah globalisasi informasi. Yang ketiga ini berkaitan erat dengan proses globalisasi industri. Kemajuan teknologi telekomunikasi saat ini telah memungkinkan seorang manajer yang berada di negara asal mampu mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan perusahaannya di berbagai negara. Selain itu, diversifikasi produk dan diskriminasi harga dapat dilakukan untuk masing-masing segmen konsumen karena informasi mengenai perilaku konsumen dan kondisi pasar telah diketahui secara lebih pasti.

Yang *keempat* adalah globalisasi konsumen. Hal ini ditandai dengan semakin banyak barang konsumsi asing memasuki pasar domestik, seperti ayam goreng Kentucky, Pizza Hut yang terasa tidak asing lagi. Minuman ringan yang telah disesuaikan dengan lidah domestik hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang seakan-akan produk tersebut buatan Indonesia. Demikian pula, semakin banyak orang yang dapat bepergian ke luar negeri dan serbuan media visual telah mempengaruhi pola konsumsi domestik. Pada sisi lain, konsumen pun semakin mengetahui informasi pasar sehingga konsumen dapat memilih barang yang dikehendaki. Dan akhirnya, konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan yang optimal.²

Keempat proses di atas tergantung pada kemauan politik masing-masing negara membuka diri. Kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan kepada penanam modal asing akan mendorong modal asing ke ekonomi domestik. Demikian pula penurunan bea masuk dan tarif, arus barang dan jasa akan mengalir secara deras ke dalam negeri. Pada sisi lain, industri domestik akan

mendapatkan saingan yang semakin ketat. Akibat kondisi tersebut adalah industri domestik yang bertahan adalah industri yang memiliki "keunggulan".

Perubahan dari era industri ke era informasi juga merubah tatanan kehidupan berekonomi. Perubahan tatanan tersebut ditunjukkan oleh tabel 1³. Pada tabel tersebut, kekuatan pemerintah digantikan oleh (pemilik) kapital dan informasi dalam penentuan (arah) alokasi faktor (produksi). Hal ini akan memberikan konsekuensi berupa melemahnya kontrol negara dalam perekonomian dan perubahan tatanan sosial-ekonomi di masyarakat.

Perubahan masyarakat itu sendiri dijelaskan dengan oleh Wilmal Dissanayake⁴. Tanah merupakan sumber daya ekonomi yang utama bagi masyarakat pertanian, sedangkan masyarakat industri dan informasi sangat membutuhkan kapital dan keahlian. Demikian pula, produk yang dihasilkan berbeda. Pada masyarakat pertanian, produk yang dihasilkan makanan, sedangkan masyarakat industri dan informasi menghasilkan barang dan jasa informasi. Kondisi tersebut memungkinkan perbedaan kebutuhan masing-masing segmen masyarakat. Perbedaan ini bisa menimbulkan kerawanan sosial yang harus dihadapi. Peristiwa penggusuran, demonstrasi atau tuntutan kenaikan upah merupakan contoh-contoh perbedaan persepsi dan kepentingan dari kondisi atau kebutuhan masyarakat yang berbeda⁵.

Pada masa perubahan ini, peran negara sangat diperlukan untuk menjembatani dan mensinkronisasi perbedaan kebutuhan dan

³ Ohmae, Kenichi., 1995, *ibid*, hal 141-149.

⁴ Dissanayake, Wilmal., "Cultural Intergration in a Global Age", dalam *The World and I*, Januari 1990, hal 87.

⁵ Rais, M. Amien., 1996, *Budaya Bangsa dan Era Globalisasi: Pokok-pokok Pikiran*, Makalah Seminar Bakom BKB-Lemhanas, Jakarta.

² Ohmae, Kenichi., 1995, *The End Of The Nation State: The Rise of Regional Economies*, The Free Press, New York, hal 1-5.

Tabel 1. Perubahan Era Industri ke Era Informasi

	Industrial Age	Information Age
Timing	19-20th century	20-21th century
Discription	Driven by nation-state governments	Driven by private capital and information
	National sovereignty	Citizen sovereignty
	Strong control by centralized forces	Autonomous networks of interdependent private enterprises and regional entities
	Sensitive to borders	Inherently borders
	Favors domestic capital and protects domestic companies	Welcomes foreign capital and world-class companies/expertise creating high-quality jobs
	Aims for one-state prosperity through development of export-led, manufacturing-driven economic growth	Aims for harmonious regional prosperity based on interdependent, network-centric companies creating
	Government initiatives	Entrepreneurial initiatives
	Good government strengthens priority industries	Good government nurtures regional development, not focused in specific industry
	Change occurs gradually over decades	Change occurs suddenly in months to years
Winner	Germany	Hong Kong/Shoeshine
	Japan/New Japans United Kingdom United State	Singapore/Johor/Batam Taiwan/Fujian Southern China (Pearl River Delta) Southern India (Bangalore) North Mexico/Southwestern US Silicon Valley Lombardia Pacific Northwest of United States

Sumber: Ohmae, Kenichi., 1995, *The End Of The Nation State: The Rise of Regional Economies*, The Free Press, New York, hal 143.

kepentingan masyarakat. Sebagaimana telah disadari bahwa Indonesia, sebagaimana negara berkembang yang lain, memiliki tiga strata masyarakat tersebut. Secara natural, masing-masing strata tersebut akan memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Jika hal tersebut diserahkan ke "mekanisme alami" maka proses homogenisasi mungkin terjadi. Dalam proses tersebut, terjadi *flattening-out*, yang berarti pihak yang kuat mendominasi yang lemah. Negara mempunyai peran untuk melindungi pihak yang lemah, sehingga proses yang berlangsung adalah proses integrasi. Proses integrasi ini memperhatikan keberadaan si kuat dan si lemah dalam memanfaatkan sumber-sumber kekayaan untuk mencapai kepentingan bersama. Kelangsungan hidup bersama lebih diutamakan tanpa mengurangi kebebasan seseorang mengekspresikan kemampuan diri. Misalkan: pembangunan lapangan golf perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang masih menjadikan tanah sebagai sumber ekonomi utama.

Maka, melemahnya peran negara dalam perekonomian harus diikuti oleh semakin kuatnya peran negara dalam menjaga prinsip-prinsip pertukaran yang *fair*. Dalam ekonomi kapitalis sendiri, sebagaimana cita-cita Adam Smith, negara berperan menjaga sistem sosial yang telah disepakati di bawah

hukum-hukum keadilan⁶. Selain itu, negara membantu pemerataan kepemilikan faktor produksi melalui program-program yang dirancang dan dilaksanakan, karena mekanisme pasar hanya menjamin alokasi yang efisien dan tidak menjamin terjadi distribusi di antara pelaku ekonomi⁷.

Bagaimanakah ekonom melihat era informasi ini? Dalam ekonomi mikro mengenal ekonomi informasi. Dalam ekonomi informasi ini terdapat dua masalah yang menjadikan kegagalan pasar. Masalah pertama, adalah yang disebut dengan *hidden type*. Pada *hidden type*, karakteristik pelaku ekonomi tidak mudah diketahui apakah pelaku ekonomi tersebut suka beresiko atau tidak. Sebagai contoh adalah pinjaman bank dan premi asuransi. Orang yang menggunakan dana kredit beresiko tinggi seharusnya dikenai harga yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak suka beresiko. Juga, premi asuransi mobil pada orang yang suka "ngebut" seharusnya lebih tinggi dibandingkan orang yang mengendarai mobil secara hati-hati sekali.

⁶ Smith, Adam., *An Inquiry into The Nature and The Cause of The Wealth of Nations*, disunting oleh Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1985, hal 55. Adam Smith menjelaskan bahwa kalau harga suatu komoditi tertentu tidak lebih atau kurang dari apa yang cukup untuk membayar sewa tanah, upah buruh, dan keuntungan pemilik modal dalam mengusahakan, menyiapkan dan membawanya ke pasar, sesuai dengan tarif alamiahnya, maka komoditi itu dijual pada tingkat harga yang disebut sebagai harga alamiah. Dengan demikian, komoditi itu dijual persis sesuai dengan nilainya yang pantas, atau dijual sesuai dengan tingkat biaya yang telah dikeluarkan pembawa ke pasar.

⁷ Penjelasan ini akan dijelaskan kemudian. Penjelasan ini dapat ditelusuri lebih lanjut pada Varian, Hal R., 1990, *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, Second Edition, W. W. Norton & Co, New York.

Permasalahan kedua adalah *hidden action*, yaitu tindakan pelaku ekonomi tidak mudah ditebak. Setelah seseorang mendapatkan kredit, orang bersangkutan ada kemungkinan menggunakan uang kredit tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi atau kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana semula. Demikian pula, orang yang telah memperoleh jaminan asuransi, mobil misalnya, akan cenderung tidak selalu mengunci mobil atau merawat mobil dengan seksama.

Dampak kedua masalah tersebut, harga (bisa harga barang atau uang) ditetapkan secara rata-rata. Dengan menetapkan tingkat harga (uang) secara rata-rata ini menjadikan orang yang memiliki resiko rendah enggan mengambil kredit, sedangkan orang yang memiliki resiko tinggi akan mengambil kredit. Akibatnya, bank (pemberi pinjaman) menjadi tempat bagi orang-orang yang memiliki resiko tinggi. Keadaan yang demikian jelas tidak menguntungkan bagi pihak pemberi pinjaman. Masalah tersebut juga dapat terjadi pula pada ketidakmampuan melihat karakteristik barang (yang mungkin disembunyikan atau dikaburkan oleh penjual) menjadikan barang bermutu baik kalah bersaing dengan barang-barang yang bermutu jelek.

Sementara ini, pemecahan masalah tersebut adalah dengan jaminan dan insentif. Sebagai misal adalah jaminan bank, jaminan purna jual, bonus dan hadiah, ataupun promosi jabatan. Namun hal ini masih juga menemui kegagalan karena dua hal⁸. Yang pertama, adalah *participation constraint* (*individual rationality*). Hambatan tersebut disebabkan karena pelaku ekonomi memiliki kesempatan atau pilihan yang lebih banyak dari pada pemberi jaminan atau insentif. Dalam era informasi ini, kondisi ini

dimungkinkan dengan kemampuan mengakses informasi ataupun memiliki ketrampilan dan intelektual yang semakin tinggi.

Yang kedua adalah *incentive compatibility*. Pelaku ekonomi akan memilih pilihan yang terbaik (optimal) yang diberikan oleh pemberi insentif, dan pelaku ekonomi akan bekerja sesuai dengan insentif yang diberikan. Dalam hal ini, pemberi insentif tidak dapat memilih pilihan yang diinginkan kepada pelaku ekonomi. Dalam era informasi ini, aturan main (*preferred rule*) yang digunakan adalah *participatory democracy*⁹.

Maka, negara, yang dalam hal ini pemerintahan, tidak lagi dapat mensamarkan informasi kepada masyarakat, karena masyarakat dapat memperoleh informasi dari sumber lain yang mungkin juga tidak bertanggung jawab. Hal tersebut justru semakin merepotkan pemerintah dalam menjamin kelangsungan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah yang bersih diperlukan untuk menjamin perdagangan yang fair dalam era informasi.

Penilaian keunggulan komparatif

Pada saat ini, kemampuan kompetitif industri Indonesia masih menjadi bahan perdebatan. Pada satu kubu merasa optimis terhadap kemampuan kompetitif industri Indonesia, sedangkan kubu lainnya merasa pesimis. Mengapa hal tersebut menjadi bahan perdebatan?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perdebatan model-model perdagangan itu sendiri masih menjadi polemik. Dalam model perdagangan dan pembangunan dapat dibagi menjadi dua model besar, yaitu model

⁸ Varian, Hal R., 1992, *Microeconomic Analysis*, Third Edition, W. W. Norton & Company, New York, hal 411-470.

⁹ Dewanta, Awan Setya dan kawan-kawan., 1992, *Monografi Demokrasi*, PPSK, Yogyakarta.

perdagangan simetris dan asimetris¹⁰. Pada model perdagangan simetris dikenal dua teori dasar perdagangan yaitu teori perdagangan Ricardo dan Heckscher-Ohlin (H-O). Model perdagangan Ricardo menitikberatkan kepada perbedaan produktivitas tenaga kerja atau teknologi. Dengan asumsi mobilitas faktor produksi tenaga kerja dalam perekonomian domestik dan immobilitas dalam perekonomian antar negara, perdagangan internasional akan memberikan keuntungan kepada negara yang melakukan spesialisasi produk sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki. Dalam arti sempit adalah produktivitas tenaga kerja menentukan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Suatu negara X memiliki keunggulan relatif terhadap produktivitas pada industri pakaian, maka negara X tersebut akan mendapatkan keuntungan mengadakan perdagangan internasional dengan mengekspor pakaian dan mengimpor non-pakaian.

Kondisi di atas akan terjadi apabila biaya transportasi adalah nol. Apabila biaya transportasi menjadi signifikan terhadap harga barang, maka negara yang lebih dekat pasar akan memperoleh keuntungan komparatif meskipun negara tersebut hanya memiliki tingkat produktivitas yang sama dengan negara lain. Negara Korea akan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan Malaysia untuk mensuplai barang-barang yang diperlukan oleh Jepang, meskipun kedua negara tersebut mempunyai produktivitas yang sama. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa negara yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi belum berarti memiliki keunggulan komparatif apabila tidak didukung oleh biaya transportasi yang efisien. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingginya biaya-biaya

tambahan (yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan biaya produksi) akan menetralkan keunggulan produktivitas tenaga kerja yang dimiliki.

Model H-O memfokuskan kepada khususnya faktor produksi yang disebabkan oleh perbedaan faktor intensitas dan kepemilikan faktor yang melimpah. Negara X akan memperoleh keunggulan komparatif apabila negara tersebut memilih memproduksi barang secara intensif terhadap faktor yang melimpah tersebut. Ini berarti bahwa negara yang memiliki jumlah faktor tenaga kerja yang melimpah akan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional apabila negara tersebut menggunakan teknologi produksi padat karya.

Tetapi, model H-O kurang didukung oleh bukti-bukti empiris karena sering terjadi faktor "pembalikan". Negara yang dianggap memiliki faktor modal yang melimpah justru mengimpor barang-barang yang bersifat kapital intensif sebagaimana dibuktikan pertama kali oleh hasil penelitian Leontief. Disamping itu, penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan investasi serta perkembangan perdagangan intra-industri mengakibatkan peningkatan mobilitas faktor antar sektor ataupun antar negara, sehingga kekhususan faktor melemah atau terjadi pembalikan faktor.

Dari model H-O ini dapat disimpulkan bahwa negara yang hanya mengandalkan faktor yang melimpah (kekayaan alam atau jumlah tenaga kerja melimpah) dan intensitas pada faktor yang melimpah (upah tenaga kerja dan bahan baku domestik yang murah) tidak dapat mempertahankan keunggulan komparatifnya. Industri pakaian yang pernah menjadi primadona ekspor non-migas Indonesia memperoleh persaingan yang semakin ketat dari negara Vietnam ataupun Cina yang mulai membuka diri. Untuk itu, maka intervensi pemerintah perlu ditujukan ke arah sumber distorsi, karena

¹⁰ Gemmell, Norman. (Editor), 1992, *Ilmu Ekonomi Pembangunan: Beberapa Survai*, LP3ES, Jakarta, hal 11-33.

faktor kekhususan tidak berjangka waktu panjang.

Model pembangunan asimetrik menunjukkan keadaan yang timpang antara negara yang mengadakan perdagangan. Model ini memberikan pengertian bahwa perdagangan tidak secara otomatis memberikan kesejahteraan yang seimbang bagi mitra dagang. Pendapat yang lebih ekstrim mengatakan bahwa perdagangan (bebas) justru membuat sengsara penduduk yang tinggal di negara-negara berkembang.

Ketimpangan perdagangan dapat disebabkan oleh ketimpangan nilai tukar perdagangan. Contoh yang sering dikemukakan adalah ketimpangan nilai tukar antara nilai ekspor negara berkembang (yang masih memfokuskan kepada hasil-hasil pertanian) dan nilai impor negara berkembang (yang merupakan barang-barang industri). Akibatnya, negara berkembang memperoleh imbalan yang lebih kecil dibandingkan imbalan yang diperoleh negara maju.

Kondisi tersebut juga telah ditunjukkan oleh teori *welfare* yang kedua¹¹. Dalam teori tersebut ditunjukkan bahwa permasalahan alokasi dan distribusi adalah terpisah. Barang dan jasa akan dialokasikan secara efisien (*pareto optimal*) apabila marginal substitusi yang dimiliki konsumen telah sama dengan produsen. Keadaan *pareto optimal* tersebut tidak memperlmasalahkan berapa banyak *endowment* yang dimiliki oleh konsumen atau produsen sebelum mengadakan pertukaran (perdagangan). Ini berarti bahwa konsumen yang membawa *endowment* yang kecil juga akan memperoleh imbalan yang kecil pula karena *pareto optimal* orang tersebut telah dicapai. Bagaimanapun "kemenangan" atau "keberuntungan" tetap berpihak kepada yang kuat. Kondisi ini

memberikan pengertian bahwa perdagangan bebas tidak menjamin keuntungan bersama.

Disamping ketimpangan nilai tukar, model perdagangan asimetris ini disebabkan oleh kesenjangan teknologi dan dua celah (*dualistic model*). Kesenjangan teknologi dan siklus produk timbul sebagai akibat dari tingkat teknologi telah dicapai terlebih dahulu oleh negara maju dibandingkan negara berkembang. Teknologi negara berkembang hanya merupakan alih teknologi internasional yang dilakukan oleh negara maju (negara-negara Barat atau Utara). Hal tersebut dapat diibaratkan sebagai siklus produk yang perlu dilalui oleh masing-masing negara. Pada awal ekonomi Jepang bangkit, industri pakaian (*garment*) menjadi tulang punggung ekonomi Jepang. Setelah itu, industri pakaian tersebut ditinggalkan oleh Jepang dan dialihkan ke Indonesia, dan kemudian dialihkan lagi ke Vietnam.

Model perdagangan dua celah ini berkaitan erat dengan kondisi struktural di negara-negara berkembang. Pada umumnya, negara-negara berkembang memiliki ketimpangan struktural antara sektor tradisional dan modern. Demikian pula, dengan adanya gap antara kebutuhan investasi dan ketersediaan tabungan, gap teknologi, gap kekayaan yang dijumpai di negara-negara berkembang, menjadikan negara-negara berkembang tersebut memiliki sifat ketergantungan.

Dari dua kerangka model perdagangan tersebut menunjukkan bahwa keunggulan komparatif perlu dimiliki oleh suatu bangsa sebagaimana ditulis oleh Michael Porter¹², yang antara lain adalah tenaga kerja terdidik dan menguasai jaringan informasi. Berbagai media dan pusat penelitian mengeluarkan susunan atau peringkat kemampuan kompetisi suatu negara. Oleh karena ukuran dan standar yang dipergunakan berbeda,

¹¹ Varian, Hal R., 1990, *Intermediate Micro-economics: A Modern Approach*, Second Edition, W. W. Norton & Co, New York, hal 493-497.

¹² Porter, Michael., 1990, *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, New York.

komposisi penentuan peringkat keunggulan kompetitif pun juga berbeda, meskipun masing-masing ukuran dan standar yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam melakukan penelitian terhadap keunggulan komparatif perlu hati-hati, sebagaimana diingatkan oleh Paul Krugman¹³. Dalam melakukan perbandingan antara keunggulan kompetitif dari sebuah negara tidak dapat serta merta dianalogikan dengan sebuah perusahaan¹⁴. Penyederhanaan analogi ini menimbulkan kesalahan yang fatal apabila neraca pembayaran dijadikan ukuran dalam menentukan keunggulan kompetitif dari suatu negara. Bila keunggulan kompetitif diartikan sebagai kemampuan menjual lebih banyak dibandingkan membeli, maka surplus neraca pembayaran mungkin suatu pertanda melemahnya keunggulan komparatif suatu negara. Sebagaimana ditunjukkan oleh keterpaksaan pemerintah Mexico untuk mencapai surplus neraca pembayaran yang cukup besar pada tahun 1980-an karena negara tersebut dipaksa untuk membayar bunga utang, sementara investor baru menolak memberikan pinjaman baru. Pada tahun 1990-an, neraca pembayaran kembali defisit setelah investor baru memulai memberikan bantuan baru. Kondisi ini berlainan dengan surplus neraca pembayaran yang dialami oleh negara Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, dimana surplus yang dicapai merupakan kemampuan melakukan ekspor. Disamping itu, negara tidak melakukan persaingan

sebagaimana dilakukan oleh perusahaan. Peningkatan ekonomi suatu negara akan meningkatkan ekonomi negara lain. Dengan kata lain, permintaan impor suatu negara akan meningkat dengan peningkatan pendapatan negara pengimpor tersebut. Bagi perusahaan, suatu perusahaan yang memperoleh peningkatan pendapatan akan berakibat buruk terhadap perusahaan saingannya.

Maka, pengukuran keunggulan kompetitif yang dimiliki suatu negara perlu dibedakan dengan pengukuran keunggulan suatu perusahaan. Bila hal tersebut kurang diperhatikan maka hasil observasi yang dilakukan bisa menyesatkan dan justru menimbulkan kesalahan alokasi faktor.

Potensi ekonomi Indonesia

Dengan adanya dua model perdagangan tersebut, bagaimanakah mengukur potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas dalam era informasi ini? Berbagai metode penilaian dan publikasi telah dapat digunakan untuk menilai posisi produk Indonesia di pasar internasional. Dalam penilaian tersebut perlu dilakukan secara hati-hati karena penentuan keunggulan komparatif yang keliru dapat menghasilkan kesalahan alokasi faktor.

Dengan perdagangan bebas, volume perdagangan menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh volume perdagangan baik inter ataupun intra perdagangan. Pada tabel 3, selama 10 tahun (1980-1990) volume perdagangan dunia meningkat dari US\$ 4.057,2 miliar menjadi US\$ 6.976,5 miliar atau sebesar 5,6% per tahun.

Peningkatan perdagangan ini seringkali diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan bersama, sebagaimana harapan pada model perdagangan simetris. Tetapi, hal tersebut mungkin hanya berlaku bagi perdagangan intra-industri antara negara kaya dengan negara kaya atau negara berkembang dengan

¹³ Krugman, Paul., 1994, "Competitiveness: A Dangerous Obsession", dalam *Foreign Affairs*, March/April, hal 28-44.

¹⁴ Perusahaan yang tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif dapat segera menutup usaha yang dilakukan dan membuka usaha lain. Negara tidak mungkin menghindari usaha yang dilakukan meskipun usaha tersebut tidak kompetitif.

Table 2. Intergrasi dalam Era Global

Categories of Change	Agricultural Society	Industrial Society	Information Society
1. Product	Food	Goods	Information
2. Factors of Production	Land	Capital	Expertise
3. Production Venue	Household	Factory	Information Utility
4. Actors	Farmer/artisans	Factory Workers	Technicians
5. Nature of Technology	Tool-oriented	Power Technology	Information Technology
6. Methodology	Trial and Error	Experiment	Abstract Theory/Simulation
7. Prerequisites for Success	Speech	Verbal and Print Literacy	Visual/aural/computer literacy
8. Guiding Factor	Tradition	Economic Growth	Codification of Knowledge
9. Preferred Rule	Hierarchical/authoritarian	Representative Democracy	Participatory Democracy
10. Unifying Principle	Regionalism	Nationalism	Globalism

Sumber: Dissanayake, Wilmal., "Cultural Integration in a Global Age", dalam *The World and I*, Januari 1990, hal 87.

Tabel 3. Pangsa Perdagangan Dunia Tahun 1980 dan 1990

	1980		1990	
	Miliar US\$	Pangsa (%) ¹⁾	Miliar US\$	Pangsa (%) ¹⁾
Perdagangan Dunia	4.057,2		6.976,5	
Perdagangan intra-Pasifik	378,0	9,3	939,3	13,5
Perdagangan intra-Uni-Eropa	309,0	7,6	753,0	10,8
Perdagangan intra-Amerika Utara	102,0	28,0 2)	230,0	24,5 2)
Perdagangan intra-Asia Timur	100,0	27,0 2)	286,3	30,5 2)
Perdagangan intra ASEAN	24,4	6,4	53,4	5,7 2)
Perdagangan Amerika Utara-Asia Timur	118,6	31,4 2)	326,0	34,7 2)

Keterangan:

1) Pangsa pasar terhadap perdagangan dunia.

2) Pangsa pasar terhadap perdagangan intra-Pasifik.

Sumber: Anggito Abimanyu dan Mudrajad Kuncoro, "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi: Sebuah Catatan Empiris", dalam Arfani, Riza Noer., 1996, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 343.

negara berkembang lainnya. Pada tabel 3 dapat dibandingkan antara perdagangan intra-Pasifik dan intra Uni-Eropa, kedua kawasan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif sama, meskipun pangsa pasar yang dimiliki oleh negara-negara di Pasifik lebih besar. Pertumbuhan perdagangan intra Pasifik sebesar 9,5% per tahun, sedangkan pertumbuhan perdagangan intra Uni-Eropa sebesar 9,3%. Pertumbuhan perdagangan yang pesat di antara negara-negara Pasifik masih didominasi oleh negara-negara Asia Timur sendiri dan Asia Timur-Amerika Utara. Untuk negara-negara ASEAN, perdagangan antara negara relatif kecil dibandingkan negara Asia Timur dan Amerika Utara (Kawasan Asia - Pasifik). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara kecil masih menjadi pengikut dalam perdagangan internasional.

Perdagangan itu sendiri perlu didukung oleh produk domestik yang andal. Kehandalan suatu produk perlu mendapatkan dukungan dari industri yang berada di hulu dan di hilir. Dengan dukungan tersebut, produk yang andal akan mendapatkan dukungan yang kuat dari ekonomi domestik, sehingga gejala ekonomi luar negeri (eksternal) dapat dihindari. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia kurang memiliki kaitan dengan produksi di dalam negeri baik ke depan ataupun ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa produksi di dalam negeri secara relatif kurang mendukung perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa biaya produksi yang dilakukan tidak hanya disebabkan oleh

kondisi dalam negeri tetapi juga oleh kondisi luar negeri¹⁵.

Hal tersebut memberikan konsekuensi berupa biaya produksi di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan produksi di luar negeri. Berdasarkan perhitungan Anggito Abimanyu (1995), rata-rata harga produksi dalam negeri lebih tinggi 22% dibandingkan dengan produksi sejenis di luar negeri. Kondisi ini menjadikan barang dalam negeri tidak mudah dijual di pasar internasional.

Untuk meningkatkan ekspor non-migas, pemerintah telah melakukan berbagai deregulasi untuk memangkas biaya produksi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi produksi. Dalam studi yang dilakukan oleh Anggito Abimanyu (1995) menunjukkan bahwa deregulasi telah meningkatkan nilai tambah sektor produksi manufaktur. Peningkatan tersebut juga meningkatkan nilai tambah yang diperoleh tenaga kerja, dan berarti pula produktifitas tenaga kerja mengalami peningkatan.

Tetapi, peningkatan nilai tambah tersebut masih dinikmati oleh perusahaan besar. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 6. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki tingkat probabilitas untuk menjadi besar lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan kecil justru memiliki tingkat probabilitas yang lebih besar untuk bangkrut. Hal ini merupakan ironi dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pengambil keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, secara rata-rata, deregulasi ekonomi yang telah dilakukan masih memberikan keuntungan bagi pengusaha besar atau peluang yang diberikan masih

¹⁵ Hal tersebut juga merupakan bukti bahwa Indonesia mengalami kesulitan menekan harga barang ekspor karena industri Indonesia masih memiliki tergantungan suplai bahan baku impor dan mengimpor inflasi dari negara pengeksport bahan baku.

Tabel 4. Perdagangan Intra Asia Pasifik dan Dampak Kaitan ke Depan dan ke Belakang

Negara	Berkaitan ke Belakang	Berkaitan ke Depan
Indonesia	21,75	21,03
Malaysia	22,62	21,03
Thailand	22,94	26,82
China	25,06	26,82
Korea	24,31	22,81
Japan	26,17	33,29
USA	25,43	30,91

Sumber: International Asia Pasific Input-Output, 1985.

Tabel 5. Perbandingan Harga

Komoditi	%
Tekstil	39
Produk Kayu	-22
Kertas	23
Pupuk	9
Baja	13
Rata-rata	22

Sumber: Anggito Abimanyu, 1995.

Tabel 6. Tingkat Probabilitas Transisi Manufactur Indonesia, 1980-1992

Ukuran Perusahaan	Probabilitas Menjadi Besar		Probabilitas Menjadi Kecil		Probabilitas Menjadi Bangkrut	
	1980/85	1986/92	1980/85	1986/92	1980/85	1986/92
Kecil	12	12	32	37	32	37
Menengah 1	21	26	36	38	17	23
Menengah 2	9	14	23	24	11	17
Besar	20	30	29	26	3	13
Sangat Besar	-	-	33	28	4	11

Keterangan:

Klasifikasi ukuran perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. perusahaan kecil: 20-49 tenaga kerja
2. perusahaan menengah 1: 50-99 tenaga kerja
3. perusahaan menengah 2: 100-499 tenaga kerja
4. perusahaan besar: 500-1000 tenaga kerja
5. perusahaan sangat besar: lebih dari 1000 tenaga kerja

Sumber: Anggito Abimanyu dan Mudrajad Kuncoro, "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi: Sebuah Catatan Empiris", dalam Arfani, Riza Noer., 1996, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Rajawali-Pers, Jakarta, hal 349, tabel 8.

Tabel 7. Model Penawaran Ekspor Sektor Pertanian, 1981-1994

Parameter	Nilai
Constanta (β_0)	4.0401
Variabel X_1 (β_1)	tidak signifikan
Variabel Dummy (β_2)	.1728
R^2	.8155
D-W test	2.151
σ	tidak berubah
α	tidak berubah

Sumber: Dewanta, Awan Setya., 1996, Effectiveness: Deregulation on Agriculture Sectors in 1987, Paper, UP-Diliman.

Tabel 8. Konsentrasi dan Orientasi Ekspor

	Orientasi Ekspor Tinggi	Orientasi Ekspor Rendah
Konsentrasi Tinggi		Bukan Logam Barang dari Logam Logam Dasar Kimia, Kertas, Makanan
Konsentrasi Rendah	Barang dari Kayu Tekstil Sepatu	

Keterangan:

1. Konsentrasi Tinggi diukur dari konsentrasi subsektor (rasio 4 perusahaan terbesar pada tahun 1991) lebih tinggi dibandingkan rata-rata tertimbang industri yang sebesar 47%.
2. Orientasi Ekspor Tinggi diukur dari pangsa total produksi yang ekspor lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri yang sebesar 25% (pada tahun 1992).

Sumber: Farrukh Iqbal, 1995.

belum memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil.

Studi lain yang dilakukan oleh penulis adalah deregulasi pemerintah pada akhir tahun 1987¹⁶. Sebagaimana hasil penelitian Anggito Abimanyu, deregulasi tersebut telah mendorong peningkatan penawaran ekspor sektor pertanian. Peningkatan ekspor di sektor pertanian tersebut ditunjukkan oleh konstanta pada model regresi (lihat tabel 7).

Secara teori, dengan dibukanya hambatan ekspor, penawaran ekspor akan memberikan rangsangan (insentif) untuk menggunakan teknologi baru dan hadirnya perusahaan (pendatang) baru sebagai konsekuensi dari perubahan rasio harga domestik dan harga dunia. Tetapi peningkatan penawaran ekspor tersebut tidak didukung oleh peningkatan teknologi (σ) dan jumlah perusahaan (α). Maka, hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa deregulasi ekonomi masih memberikan peluang terhadap perusahaan yang telah ada. Jika struktur industri telah oligopoli, maka deregulasi ekonomi belum efektif untuk meridobrak struktur industri dalam negeri, meskipun deregulasi tersebut telah berhasil meningkatkan volume ekspor non-migas nasional.

Hasil penelitian tersebut bertambah menarik apabila dikaitkan dengan hasil penelitian Farrukh Iqbal yang menunjukkan industri dalam negeri masih dapat dikatakan sebagai jago kandang (tabel 8). Semakin tinggi tingkat konsentrasi industri berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat orientasi ekspor. Ini berarti jika deregulasi-deregulasi ekonomi yang telah dilakukan (periode 1980-1992) tidak efektif menurunkan

tingkat konsentrasi, maka daya saing industri dalam negeri belum dapat diharapkan.

Penutup

Dari uraian tulisan ini, dapat disampaikan bahwa posisi Indonesia berada di persimpangan jalan yang perlu segera diantisipasi apabila Indonesia tidak menginginkan menjadi sekedar "penggembira" dalam perdagangan internasional. Pada era informasi ini, dorongan terhadap mobilitas perdagangan dan investasi tidak lagi dapat dibendung. Penguasaan kapital dan informasi menjadi titik sentral masyarakat pasca-industri.

Meskipun kondisi Indonesia yang masih memiliki tiga strata masyarakat, persiapan untuk menghadapi perdagangan bebas era informasi perlu segera dilakukan. Langkah yang paling strategis adalah mempersiapkan masyarakat yang tertinggal mengejar ketertinggalannya baik melalui pendidikan dan bantuan finansial. Kebijakan dan deregulasi yang dilakukan berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi rakyat. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah (1) melakukan revisi terhadap program-program lama juga dapat dilakukan, seperti pada program bapak angkat. Program bapak angkat ini harus benar-benar rasional membantu ekonomi rakyat melalui usaha keterkaitan industri, pemagangan, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia, (2) peningkatan partisipasi ekonomi rakyat (koperasi dan usaha kecil) dengan melakukan pemberdayaan dan kesempatan berintegrasi dalam ekonomi nasional, dan (3) menghilangkan distorsi ekonomi yang masih menyulitkan usaha berskala kecil, dan (4) pengusaha sekaliber para konglomerat diwajibkan melakukan pengembangan iptek dan penelitian teknologi terapan untuk mengembangkan teknologi produksi yang dilakukan, dan meningkatkan peran dan integrasi usaha kecil ke dalam perekonomian nasional.

¹⁶ Pada akhir tahun 1987, pemerintah mengumumkan tentang paket deregulasi mengenai prosedur perdagangan dan perpajakan untuk mendukung promosi ekspor non-migas. Pemerintah mempermudah ijin ekspor dan surat izin usaha perdagangan.

Daftar Pustaka

- Arfani, Riza Noer.,(1966), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dewanta, Awan Setya dan kawan-kawan., (1992), *Monografi Demokrasi*, PPSK, Yogyakarta.
- Dissanayake, Wilmal., Januari (1990), "Cultural Integration in a Global Age", dalam *The World and I*, Januari.
- Gemmell, Norman. (Editor), (1992), *Ilmu Ekonomi Pembangunan: Beberapa Survei*, LP3ES.
- Krugman, Paul., March/April (1994) "Competitiveness: A Dangerous Obsession", dalam *Foreign Affairs*, March/April 1994.
- Ohmae, Kenichi., (1995), *The End Of The Nation State: The Rise of Regional Economics*, The Free Press, New York.
- Porter, Michael., (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, New York.
- Ploeg, Frederick Van Der, ed., (1995), *The Handbook of International Macroeconomics*, Massachusetts: Basil Blackwell, Cambridge.
- Rais, M. Amien., (1996), *Budaya Bangsa dan Era Globalisasi: Pokok-pokok Pikiran*, Makalah Seminar Bakom BKB-Lemhanas, Jakarta.
- Varian, Hal R., (1992), *Microeconomic Analysis*, Third Edition, W. W. Norton & Company, New York .
- Varian, Hal R., (1992), *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, Second Edition, W. W. Norton & Co, New York.